# 

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Isu konflik di suriah saat ini memang sudah menjadi perbincangan dunia, karena dalam konflik tersebut melibatkan beberapa negara. Dari beberapa negara yang terlibat ke dalam konflik ini terjadi banyak polemic yang terjadi diantaranya, ada sebagian negara-negara yang mendukung pemerintahan suriah saat ini dan bahkan ada yang menentang terhadap pemerintahan suriah saat ini, bahkan negara yang menentang tersebut seolah olah menjudge pemerintahan suriah saat ini lah yang menyebabkan kekisruhan semua ini terjadi. Disinilah terjadi berbagai konspirasi konpirasi yang menurut pandangan masyarakat luas menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk dimengerti dan dipahami. Maka dari itu konflik di suriah ini menjadi perhatian dunia saat ini dan menjadi salah satu perhatian dalam studi hubungan internasional.

Negara adidaya (*superpower)* salah satunya Rusia menempati posisi kuat yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi kesepakatan dan memasukan kepentingan nasional negaranya. Tiap negara berusaha untuk mencapai kepentingannya masing-masing dengan melakukan upaya peningkatan kekuatan nasional. Kekuatan Nasional mencakup berbagai macam unsur, salah satunya kekuatan militer.

Kebijakan Rusia di Suriah ternyata membuat pemberontak Suriah sangat tidak nyaman. Kelompok yang berusaha menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad itu menilai, dengan kehadiran Rusia, perang di Suriah telah berada di level yang baru, dan akan lebih sulit untuk dimenangkan."Dalam perhitungan kami, pertempuran yang terjadi saat ini akan bertambah panjang, dan harusnya itu tak terjadi jika Rusia tidak ikut campur," kata seorang pemberontak di wilayah Latkia bernama Abu Yousef al-Mouhajer. “Intervensi yang dilakukan Rusia di Suriah sepenuhnya ditujukan untuk menyelamatakan rezim Assad," sambung pemberontak yang bergabung dengan kelompok Ahrar al-Sham itu, seperti dilansir hotair pada Senin (21/9/2015). Sejauh ini Rusia diketahui telah mengirimkan penasihat militer dan juga kendaaan tempur ke Suriah. Kehadiran penasihat militer ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pasukan pemerintah Suriah, dan mengajari bagaimana cara menggunakan kendaraan tempur yang mereka bawa.

Negeri Beruang Merah itu juga tidak menutup kemungkinan untuk mengirimkan pesawat atau tentara ke Suriah. Menurut pemerintah Rusia, semuanya tergantung dari Suriah, apakah mereka meminta bantuan tersebut atau tidak. Apa yang dilakukan Rusia di Suriah sendiri sejatinya tidak terlalu mengherankan. Mengingat Rusia adalah salah satu mitra dekat Suriah di bawah pimpinan Assad, dan sudah lama memberikan sokongan, baik secara militer, ataupun finansial kepada rezim Assad.[[1]](#footnote-1)

Kebangkitan kekuatan militer Rusia, di mulai ketika Presiden Vladimir Putin menjabat pada tahun 2000. Putin memprioritaskan pada sektor militer Dalam kurun waktu satu decade terakhir, hingga dewasa ini, Rusia mulai menempuh kebijakan strategis, guna memulihkan kondisi dalam negeri. Rusia masih tetap berusaha untuk mengembalikan pengaruhnya pasca Perang Dunia II, terutama dalam peningkatan kekuatan militernya, yang merupakan sektor vital negara. Rusia juga masih memiliki persenjataan Nuklir, “warisan” Uni Soviet, dan sekarang tengah dikembangkan. Rusia memiliki keinginan untuk menjadi kekuatan baru di negara-negara pecahan Uni Soviet. Keinginan ini disertai dengan memberikan pengaruh, serta merangkul negara-negara di Kawasan Eropa Timur, yang dianggap sebagai *backyard* Rusia. Namun, upaya Rusia merebut kembali hegemoni di Kawasan Eropa Timur ini, terkendala dengan adanya campur tangan pihak NATO yang di dominasi oleh Amerika Serikat, dalam memengaruhi negara-negara tersebut. Dalam hal ini, upaya nyata telah dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan sekutunya, yang berusaha memperebutkan *hegemoni* dan pengaruh di Eropa, Asia dan Seluruh dunia.[[2]](#footnote-2)

NATO (*North Atlantic Treaty Organization)* atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara dibentuk pada tanggal 4 April 1949.[[3]](#footnote-3) Pada dasarnya, NATO adalah sebuah aliansi militer regional yang mencari dukungan solidaritas diantara para anggotanya jika seandainya terjadi serangan militer ke negara anggotanya tersebut. NATO memiliki prinsip *Collective Deffence,* yaitu bahwa setiap anggota negaranya bersedia membantu anggota NATO yang lainnya, apabila diserang terlebih dahulu. Sehingga negara-negara anggota NATO membentuk pertahanan bersama. NATO hingga saat ini memiliki 28 negara anggota, yakni dengan masuknya sejumlah negara bekas Blok Timur (Belgia, Bulgaria, Canada, Republik Czecho, Denmark, Estonia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, kroasia, Albania, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat).[[4]](#footnote-4) (kroasia dan Albania menjadi anggota Terakhir yang bergabung pada tahun 2009).

Rusia sejak dahulu memiliki ikatan yang sangat dekat dengan Suriah maka dari itu Rusia dan NATO melmiliki rasa khawatir yang sama akan kedudukannya di Suriah, peran NATO di suriah jelas untuk misi perdamaian yang di emban oleh mereka apalagi dengan adanya ISIS di suriah yang menjadi perhatian utama para negara anggota NATO, terdapatnya ISIS di suriah menjadi suatu ancaman yang harus di musnahkan oleh NATO karena ISIS berbasis terorisme, dan tetapi yang saat ini menjadi kekhawatiran NATO adalah keterlibatan Rusia di suriah yang meiliki kebijakan baru untuk sama sama dalam mengemban misi perdamaian di Suriah. NATO menganggap kebijakan militer baru Rusia itu adalah suatu bentuk langkah untuk menhancurkan misi perdamaian atau pemusnahan para teroris di Suriah bukan semata hanya untuk pemusnahan terorisme.

Hal ini yang dianggap penting bagi penulis untuk dikaji, sehingga penulis mengangkat judul “**DAMPAK KEBIJAKAN MILITER RUSIA DI SURIAH TERHADAP NATO”.**

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang yang saya uraikan, bahwa dapat didentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut ;

1. Apa yang mendasari kebijakan militer Rusia di Suriah?
2. Bagaimana perimbangan pertahanan Rusia dan NATO?
3. Sejauh mana respon NATO dari kebijakan militer Rusia di Suriah?

### 1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai dampak dari kebijakan militer Rusia terhadap NATO di Suriah.

### 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “sejauh mana dampak dari kebijakan militer Rusia terhadap NATO di Suriah”

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengtahui kebijakan kebijakan apa saja yang di keluarkan oleh militer Rusia untuk menangani isu konflik di Suriah
2. Untuk mengetahui sejauh apa respon dan dampaknya terhadap NATO dari kebijakan kebijakan yang di keluarkan oleh pihak militer Rusia di Suriah

### 2. Kegunaan Penelitian

Dapat memberikan manfaat atau sumbangan untuk para peneliti dan bagi studi hubungan internasional untuk mencari suatu gambaran yang relevan dengan topic yang bersangkutan dan juga dapat memberikan suatu pandangan yang luas terhadap peneliti dengan topic yang bersangkutan

## D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### 1. Kerangka Teoritis

Pada pembahasan ini, penulis akan mencantumkan teori-teori dari para pakar terkait dengan hal-hal yang menyangkut skripsi penulis. Sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori-teori yang sudah ada.

Hubungan Internasional adalah sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perlaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya

Menurut Robert Jackson & George Sorenson dalam buku “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, mengemukakan bahwa: “Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global” (2005:3). Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan yang harus di pelajari dan dipahami, karena kebutuhannya sangatlah komplek pada dewasa ini dengan dengan arus informasi, pengaruh dan sistem internasional[[5]](#footnote-5)

Studi hubungan internasional juga diartikan sebagai studi tentang interaksi antar aktor-aktor di dunia. Interaksi ini terjadi berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Kepentingan nasional dibagi menjadi empat jenis yaitu, ideologi, ekonomi, keamanan dan prestige. Untuk memperjuangkan kepentingannya, masing-masing negara mewujudkannya dalam kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dan juga kedalam negeri.[[6]](#footnote-6)

Secara sederhana pengertian Hubungan Internasional dipahami sebagai interaksi yang terjadi antar aktor-aktor tertentu, dimana interaksi tersebut telah melampaui batas yurisdiksi nasional sebuah negara. Sementara, sebagai sebuah disiplin ilmu, Hubungan Internasional dipahami sebagai kajian akademis yang berusaha memahami interaksi antar aktor-aktor tertentu yang telah melampaui batas yurisdiksi nasional negara.

Adapun pengertian lain tentang hubungan internasional ini adalah tentang transaksi lintas batas dari semua jenis politik, ekonomi dan sosial, dan ilmu hubungan internasional juga mempelajari negosiasi perdagangan atau oprasi dari institusi atau lembaga non-state. Hubungan internasional adalah sebuah ilmu yang jugamempelajari sebab dan akibat dari hubungan antar suatu negara[[7]](#footnote-7)

Adanya hubungan antar negara dapat disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya antara negara yang berbeda. Hubungan atau kerjasama juga dapat terjadi akibat saling ketergantungan (interdepensi) untuk dapat saling memenuhi kebutuhan antara suatu negara dengan negara lain.

Menurut **Mochtar Mas’oed** Hubungan internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok.[[8]](#footnote-8)

**Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri adalah salah satu bidang kajian Hubungan Internasional dan kebijakan luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Dalam kajian kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.

**Konflik Internasional**

Konflik internasional menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.[[9]](#footnote-9)

Di antara konflik internasional yang dapat diukur, persoalan wilayah menjadi sangat penting, karena hal tersebut merupakan sifat alamiah teritorial sebuah negara. Konflik atas kontrol wilayah dapat dibedakan dalam dua variasi : Perselisihan teritorial (mengenai garis perbatasan) dan konflik atas kontrol keseluruhan wilayah termasuk perbatasan. Mempertimbangkan perbedaan utama mengenai penarikan garis batas antara kedua negara tersebut, maka negara harus mengontrol wilayah yang diperselisihkan. Karena nilai wilayah negara hampir sama dengan kesetiaan dan kefanatikan, perselisihan batas negara cenderung menjadi persoalan yang keras dalam hubungan internasional. Negara tidak akan menukar wilayahnya untuk mendapatkan uang atau imbalan apapun yang positif. Negara pun tidak akan cepat melupakan wilayah yang hilang secara paksa, seperti tatkala mengalahkan Perancis pada tahun 1871, Jerman mengambil provinsi Perancis, yaitu Alsace dan Lorreine. Perancis merasa tidak senang atas kehilangan tersebut dan rasa nasionalisme rakyat Perancis membuat sulit pendudukan Jerman atas wilayah tersebut. Pada akhirnya dikembalikan setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia ke I. Hasil dari pengembalian wilayah yang hilang dinamakan “irredentism”. Hal ini adalah bentuk dari nasionalisme yang mengarah secara langsung kepada konflik yang serius antar negara bagian.

Kemenangan dan kekalahan dalam perang artinya memperoleh atau kehilangan wilayah, bersamaan dengan kekayaan dankekuasaan dalam jangka panjang. Pada abad 20, bagaimanapun lebih banyak kemakmuran diperoleh dari perdagangan dan teknologi daripada agrikultur. Harga dari sebagian besar perselisihan teritorial, tampak lebih banyak pada keuntungan ekonomi daripada wilayah.[[10]](#footnote-10)

Konflik dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Konflik berwujud kekerasan, yaitu konflik yang mengandung kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki consensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.
2. Konflik yang tak berwujud kekerasan, yaitu konflik yang dapat ditemui pada masyarakat-negara yang memiliki consensus mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.(Halking dan budi, 2012: 173).[[11]](#footnote-11)

**Organisasi Internasional**

Organisasi internasional menurut D.W. Boweet merupakan organisasi yang dibentuk secara permanen yang didirikan atas dasar sebuat traktak (kesepakatan) yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dengan tujuan-tujuan tertentu. Darisini kita bisa pahami bahwa organsiasi inetrnasional itu lebih cenderung kepada kerjasama antara lebih dari dua negara daripada hanya dua negara saja, misalnya saja Perserikana Bangsa-bangsa atau PBB.

Kemudian ada juga pengertian lainnya seperti yang diungkapkan oleh J. Pariere Mandalangi yaitu suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan atas sebuah perjanjian yang bersifat tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara atau pemerintah atau organisasi-organisasi internasional yang sudah ada. Seperti yang sudah dituliskan pada *point* sebelumnya bahwa organisasi internasional lebih cenderung kepada kerjasama multilateral daripada bilateral[[12]](#footnote-12).

Sedangkan L.L Leonard hanya memberi ciri-ciri khusus tanpa ada batasan jelas mengenai organisasi internasional, menurutnya:

*Interbational organization has come to have special meaning and characteristics: it’s the method of conducting international relations by means offairly permanent agenciesto wich the member states have assginde responbilities and authority and through which each government may avocate policies and objectives in furtherance of its national interest.[[13]](#footnote-13)*

Organisasi internasional secara serhana dapat di definisikan sebagai “*any cooperative arrangement instituted among states, usually by basic agreement, to perform some mutually advantageous function implemented through periodic meeting and staff activities”[[14]](#footnote-14)* (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara. Umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang dijenwantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatankegiatan staff secara berkala). Jadi organisasi internasional menurut definisis ini mencangkup tiga unsur:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (*international civil servant)*

**Paradigma Realis**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma realis, yaitu Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional dan monolith, jadi bisa memperhitungkan *cost* and *benefit* dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional sehingga fokus dari penganut realism adalah *struggle for power* atau *realpolitik*. Aliran realis berpendapat bahwa sifat dasar interaksi dalam sistem internasional yakni anarki, kompetitif, kerap kali konflik, dan kerjasama dibangun hanya untuk kepentingan jangka pendek, ketertiban dan stabilitas hubungan internasional hanya akan dicapai melalui distribusi kekuatan (*power politics*).

Menurut **Viotti** dan **Kauppi** terdapat empat asumsi utama dari pendekatan realis, yaitu:

1. Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, sehingga negara merupakan unit analisis utama untuk mendapatkan penjelasan atas peristiwa internasional.
2. Negara dipandang sebagai aktor tunggal (unitary actor), karena negaralah yang menentukan suatu policy untuk menanggapi isu-isu tertentu pada suatu waktu tertentu.
3. Secara esensial negara merupakan aktor rasional (rasional aktor), suatu proses pembuatan keputusan luar negeri yang rasional yang mencakup suatu pernyataan tentang sasaran kebijakan luar negeri yang merupakan pertimbangan atas semua alternatif yang feasible menyangkut kemampuan yang dimiliki negara, kemungkinan relatif bagi pencapaian sasaran-sasaran kebijakan dengan berbagai alternatif yang dipertimbangkan secara matang, serta keuntungan dan biaya pencapaiannya.

Isu internasional utama bagi kaum realis adalah keamanan nasional (*national security*). Fokus utama realis adalah pada konflik aktual maupun potensial diantara aktor-aktor negara, dengan menjelaskan bagaimana stabilitas ini pecah, penggunaan kekuatan sebagai alat memecahkan perselisihan dan pencegahan terhadap pelanggaran integritas teritorial.[[15]](#footnote-15)

Paradigma realis lain diperkuat dengan realisme politik **Hans J. Morgenthau** dalam buku *Politics* *Among Nations*, yang menyatakan:

“**bahwa para negarawan berfikir dan bertindak menurut kepentingan yang ditentukan oleh kekuasaan, dan bukti sejarah menetapkan asumsi tersebut**”.[[16]](#footnote-16) Sementara menurut **Gilpin**, berpendapat bahwa stabilitas sistem bergantung pada eksistensi hegemoni politik dan ekonomi. Namun hal ini sulit dijaga karena perubahan ekonomi dan tekhnologi tidak pernah sekalipun terdistribusi merata antar negara-negara. Itulah alasan mengapa terdapat jarak antara status dan prestise suatu negara dan kekuatan yang dapat mereka susun sedemikian rupa untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. Secara tegas Gilpin menyatakan bahwa hingga sekarang prinsip mekanisme perubahan adalah perang atau biasa disebut dengan *perang hegemoni* (perang yang menentukan suatu negara, atau negara akan menjadi dominan dan akan mengendalikan sistem), faktor yang melatarbelakangi perubahan dalam sistem internasional adalah lingkungan dan susunan struktur yang mendorong negara untuk mengubah sistem demi kepentingan mereka seperti perubahan populasi dan difusi tekhnologi militer melalui sistem.[[17]](#footnote-17)

**Kerjasama Internasional**

Dalam Hubungan Internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam kerjasama internasional ini bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai bangsa dan negara yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama Internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Dengan kata lain kerjasama dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Mas’oed mengenai Kerjasama Internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Merupakan suatu proses dimana antar negara-negara yang berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lainnya.
2. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut.
3. Mencari kenyataan-kenyatan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu.

Mengadakan perundingan atau perjanjian di antara kedua belah pihak.**[[18]](#footnote-18)**

Berdasarkan pernyataan dari **Mas’oed** diatas, dapat diketahui bahwasannya pelaksanaan politik luar negeri tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Maka dari itu suatu kerjasama akan diusahakan untuk memperoleh manfaat yang diperkirakan akan memberikan manfaat besar dari pada konsekuensi-konsekuensi yang ditanggungnya. Suatu kerjasama diawali dengan adanya suatu kesepakatan dan yang paling mudah apabila tidak mengandung banyak resiko. Sebagaimana yang diungkapkan oleh **Frankle** bahwa masalah kerjasama terletak pada pencapaian tujuan.

Kerjasama Internasional itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yaitu:

1. Kerjasama Global, dasar utama dari kerjasama ini adalah adanya hasrat yang kuat dari berbagai bangsa di dunia untuk bersatu dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan cita-cita bersama.

2. Kerjasama Regional, indikator yang dapat menentukan kerjasama ini terwujud adalah secara geografis letaknya berdekatan, adanya kesamaan pandangan dibidang politik dan kebudayaan maupun perbedaan struktur produktivitas ekonomi.

3. Kerjasama Fungsional, kerjasama ini adalah suatu fokus yang terkonsentrasi, misal kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan lain-lain. kerjasama ini berangkat dari pemikiran yang mensyaratkan adanya kemampuan tertentu pada masing-masing partner kerjasama. Dalam artian kerjasama ini tidak akan terselenggara apabila diantara mitra kerjasama ada yang tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik diharapkan darinya oleh yang lain.

Kerjasama Ideologi, menurut **Vilfredo Pareto** adalah suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dan perjuangan kekuasaan.**[[19]](#footnote-19)**

**Keamanan Internasional**

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun definisi keamanan dewasa ini meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (inter-state relations), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat dan memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasinya.

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, dan dengan adanya berbagai macam konflik di dunia, konsep keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan (contested concept), yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda. Hal ini terjadi karena konsep keamanan makin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa (international relation) dalam era globalisasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membahayakan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal tersebut akan dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan nasional negara tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh **Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin** dalam buku Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia, yaitu:

**“Bahwa pembinaan pertahanan negara dapat dilakukan dengan konsep Preventif defense yakni strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang konkrit, yang secara langsung akan mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara”**[[20]](#footnote-20)

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian.

Sebagaimana yang dikatakan oleh **Buzan** dalam buku *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, bahwa:

**“Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda”.[[21]](#footnote-21)**

**Dimensi Keamanan dari Konsep Tradisional – Non Tradisional**

Mengemukanya berbagai konflik komunal di dunia ini, tentunya tidak terlepas dari dua persoalan; yaitu perkembangan yang terjadi di dunia internasional (globalisasi), dan semangat partikularisme domestik dan transnasional (merupakan reaksional dari globalisasi). Globalisasi telah memunculkan kecenderungan persamaan individu, kelompok dan sistem sosial yang melewati dan bahkan menghapus batas tradisional negara (*vanishing traditional borders*).

Dengan demikia, globalisasi memunculkan aktor-aktor ‘baru’ seperti gerakan separatis, kelompak penjahat lintas batas, dan kelompok teroris internasional. Konsep keamanan itu sendiri memiliki beberapa dimensi, yaitu:

1. *The origin of threats*, dalam hal ini suatu ancaman tidak saja berasal dari pihak luar (*eksternal*), tapi juga berasal dari dalam negeri yang biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti konflik etnis, budaya, dan agama.
2. *The nature of threats*, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, dengan persoalan keamanan yang lebih komprehensif karena menyangkut aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi dan HAM seiring dengan adanya perkembangan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
3. *Changing response*, dalam dimensi ini yaitu adanya pergeseran pendekatan keamanan dari yang bersifat militeristik kearah pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.
4. *Changing responsibility of security*, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan ditentukan pula oleh kerjasama internasional antar aktor non-negara.

*Core values of security*, yakni perlindungan terhadap nilai-nilai baru baik dalam tataran individu maupun global seperti penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas (transnational crime) baik itu perdagangan narkotika, pencucian uang, ataupun terorisme.**[[22]](#footnote-22)**

**Pendekatan Konsep Keamanan Non Tradisional**

Pendekatan dalam konsep keamanan *Non* Tradisional beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada dibawah negara (*state actors*), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Kemudian sifat dari ancaman keamanan itu sendiri bersifat multidimensional dan kompleks, karena ancaman keamanan dewasa ini tidak saja berasal dari militer akan tetapi berasal dari faktor lainnya seperti terjadinya perompakan, konflik etnik, masalah lingkungan hidup, kejahatan internasional, dan sebagainya. Landasan berfikir dari pendekatan *non* tradisional ini diantaranya sebagai berikut:

1. Keamanan komprehensif yang menekankan pada aspek ancaman apa yang dihadapi oleh negara. Kandungan politik dari keamanan ini adalah upaya untuk menciptakan kestabilan dan ketertiban yang mencakup semua aspek keamanan.
2. Faktor untuk menjelaskan perkembangan ini adalah proses globalisasi dan perkembangan tekhnologi informasi, demokratisasi dan hak-hak azasi manusia, masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi, masalah sosial dan budaya.
3. Bentuk ancaman yang dihadapi Negara bisa berasal dari dalam negeri seperti tekanan individu, tekanan dari Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat sebagai akibat dari proses demokratisasi dan adanya penyebaran nilai hak-hak azasi manusia. Selain itu ancaman juga bisa berasal dari luar negeri, yaitu ancaman yang datang dari transaksi-transaksi dan isu-isu yang melewati batas-batas nasional suatu negara seperti kejahatan internasional, dan sebagainya.

Pendukung dari pendekatan ini adalah aliran non realis yakni aliran liberal-Institusionalisme dan post-positifisme.**[[23]](#footnote-23)**

Dari uraian diatas beberapa asumsi yang bisa saya simpulkan yaitu:

1. Pada dasarnya semua negara memiliki dan dipengaruhi oleh kepentingannya masing-masing untuk mengeluarkan sebuah kebijakan internasionalnya dan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak saling bertolak belakang. Dewasa ini kebijakan militer Rusia yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia di Suriah sudah melewati batas wajar dari pandangan dunia internasional, karena pihak rusia telah mengirimkan pasukan terbaiknya ke suriah, maka dari itu dibutuhkan rasa saling toleransi dan menghargai agar bisa mengelola potensi konlik agar tidak meluas dan tidak menjadi suatu kontroversi dan menjadi konflik baru.
2. Dengan adanya suatu kerjasama dan mengesampingan kepentingan dari masing-masing kelompok antara Rusia dan NATO maka penanganan konflik di Suriah akan berjalan dengan baik dan akan segera menemukan sebuah solusi politik untuk Suriah..

### 2. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Dalam pengujian hipotesis ini, dengan pernyataan hipotesis **“Apabila Rusia tidak melibatkan seluruh kekuatan terbesar militernya di Suriah, maka tidak akan ada kecaman dari pihak NATO atas serangan – serangan yang dilancarkan oleh pihak Rusia di Suriah”.**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis  (Teoritik) | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Variabel Bebas :  Apabila Rusia tidak melibatkan seluruh kekuatan terbesar militernya di Suriah | 1. Adanya kebijakan militer rusia yang menyangkut pengiriman alutsista Rusia dan penasehat militer ke Suriah untuk mendukung pertahanan militer pemerintah Bashar Al-Assad | 1. Data mengenai adanya pengiriman alutsista Rusia dan penasehat militer Rusia ke Suriah   <http://international.sindonews.com/read/1046965/43/kebijakan-rusia-bikin-pemberontak-suriah-ketar-ketir-1442848503> |
| Variabel Terikat :  maka tidak akan ada kecaman dari pihak NATO atas serangan – serangan yang dilancarkan oleh pihak Rusia di Suriah | 1. Adanya kekhawatiran dan kecaman NATO terhadap kedudukan Rusia untuk menangani konflik Suriah | 1. Adanya peryataan dari pihak NATO akan kekhawatirannya atas serangan-serangan yang dilancarkan Rusia di Suriah   <https://www.intelijen.co.id/rusia-nato-dikhawatirkan-bentrok-di-suriah/>  <http://www.voaindonesia.com/a/as-nato-prihatin-dengan-peningkatan-militer-rusia-di-suriah/2955069.html> |

### 4. Skema Kerangka Teoritis

Konflik Internasional

Rusia dan NATO

Mempertahankan kedudukan di Suriah

1. Rusia membuat kebijakan militer
2. Rusia mengirim alutsista dan penasihat militer
3. Menangani konflik di Suriah

## E. METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. **Tingkat Analisis**

Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi yaitu, model korelasional, model induksionis dan model reduksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang dipergunakan adalah model analisis korelasionis dimana unit eksplenasinya dan unit analisisnya berada pada tingkat yang sama, yaitu dampak kebijakan militer Rusia di Suriah terhadap NATO.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode deskriptif analisis. Maksud dari metode ini adalah suatu metode penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data, kemudian dianalisis. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Pengumpulan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi atau mengenai fenomena yang sedang berkembang. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul melalui literatur atau referensi yang berhubungan denag masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi denagn cermat mengenai dampak kebijakan militer Rusia di Suriah terhadap NATO.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Teknik pengumpulan data adalah salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan sebuah penelitian, artinya tanpa data tidak ada penelitian, dan data yang dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang benar.
3. Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematik, logis, dan proses pencarian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksaan pembahasan, atau penelitian secara benar, yang akan menemukan kesimpulan dan memperoleh jawaban sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.
4. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari data yang menunjang bagi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat-kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-peerintah maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

## F. LOKASI DAN LAMA PENELITIAN

1. **Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jln. Lengkong Dalam II No. 17D Bandung.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan di Bandung
3. Perpustakaan Ali Alatas Kementrian Luar Negeri di Jakarta
4. BAPUSIPDA Jln. Kawaluyaan indah II no. 4 Bandung
5. Media Internet
6. **Lama Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Berisikan uraian atau informasi umum/dasar/awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan vaiabel bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum tentang dasar kebijakan militer dan tujuan kebijakan militer Rusia di Suriah

**BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kekhawatiran dan respon NATO terhadap kebijakan militer Rusia

**BAB IV: VERIFIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan terikat. Adapun isi dari bab ini ialah sejauh mana kebijakan militer Rusia di Suriah dan upaya atau respon NATO untuk kebijakan militer Rusia dalam menangani konflik di Suriah

**BAB V: KESIMPULAN**

Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasannya dan kata penutup serta saran

# 

1. http://international.sindonews.com/read/1046965/43/kebijakan-rusia-bikin-pemberontak-suriah-ketar-ketir-1442848503 [↑](#footnote-ref-1)
2. Global Security Org. Military :*Formation of Warsawa Pact.*

   http://www.globalsecurity.org/military/world/int/warsaw-pact-03.htm. Diakses tanggal 17 Januari

   2011 pukul 22.00 [↑](#footnote-ref-2)
3. The North Atlantic Treaty Organization; NATO Facts and Figures. Oktober 1971.

   Brussel [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudrajat, MPA.2004. Dampak Strategis Pasca Perluasan Keanggotaan di Dalam

   Struktur-Struktur Eropa Terhadap Indonesia (Perspektif Pertahanan-Keamanan).BPPK

   kemenlu.Vol 21 no.2 [↑](#footnote-ref-4)
5. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/jbptunikompp-gdl-ricahadamp-26721-4-unukom\_r-i.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. (Holsti dalam Jervis, 2005: 187-189). [↑](#footnote-ref-6)
7. (Perwita & Yani, 2005 : 4) [↑](#footnote-ref-7)
8. https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/ [↑](#footnote-ref-8)
9. http://rizkifahrian09.blogspot.com/2013/11/konflik-internasional.html [↑](#footnote-ref-9)
10. Internastional Relations, Third Editions,Joshua.S. Goldstein, Halaman 199 – 206. [↑](#footnote-ref-10)
11. http://rizkifahrian09.blogspot.com/2013/11/konflik-internasional.html [↑](#footnote-ref-11)
12. http://sukasosial.blogspot.com/2016/01/pengertian-organisasi-internasional.html [↑](#footnote-ref-12)
13. L.L leonard. 1951,international organization. Toronto,New York [↑](#footnote-ref-13)
14. Daniel S. Cheever dan H Field Haviland jr., 1967, *organizing for peace : international organizations in world affair,* Houghton miffin, New York [↑](#footnote-ref-14)
15. (Perwita dan Yani, 2005:25) [↑](#footnote-ref-15)
16. (Griffith, 2001:53) [↑](#footnote-ref-16)
17. (Griffith, 2001:17) [↑](#footnote-ref-17)
18. (Mas’oed, 1977:33) [↑](#footnote-ref-18)
19. (Darmayadi, 2004:1-2) [↑](#footnote-ref-19)
20. (Muhaimin, 2006:23). [↑](#footnote-ref-20)
21. (Perwita & Yani, 2005:122). [↑](#footnote-ref-21)
22. (Perwita & Yani, 2005:123-126) [↑](#footnote-ref-22)
23. (Perwita & Yani, 2005:128-129) [↑](#footnote-ref-23)